

PEKAN DEPAN POSKO DIDIRIKAN

Tahun Ini THR Tidak Boleh Dicipil

YOGYA (KR) - Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini dipastikan tidak boleh lagi secara dicipil. Perusahaan harus memberikan kepastian waktu pemberian THR berikut besarnya kepada para karyawan. Kebijakan itu pun sudah diatur melalui surat edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Rihari Wulandari, mengaku pada ketentuan tahun lalu pemberian THR bisa dicipil sampai akhir tahun.

"Sekarang sudah tidak bisa dicipil. Jadi tidak seperti tahun lalu. Hanya waktu yang diatur yakni ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja," jelasnya, Kamis (15/4).

Sesuai dalam edaran Kemenaker, kepala daerah harus memberikan ruang bagi pengusaha dan pekerja untuk berdialog mengenai kesepakatan pemberian THR. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan waktu pemberian, besaran serta jumlah yang akan menerima. Hasil kesepakatan itu pun selanjutnya disampaikan ke bidang yang mengampu hubungan industrial.

Rihari Wulandari menambahkan, sesuai ketentuan pemberian

THR diberikan maksimal H-7 lebaran. Akan tetapi jika ada kesepakatan untuk diberikan melewati batas tersebut, tidak diperbolehkan. Dengan catatan, waktu pemberian THR sudah disepakati bersama serta tidak menimbulkan perselisihan.

"Jadi kalau sudah sepakat untuk diberikan H-1 atau H-3 misalnya, boleh saja. Asal itu disampaikan ke dinas," imbuhnya.

Sedangkan terkait dengan nominal THR, besarnya dapat disesuaikan secara proporsional. Mengingat, selama pandemi banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan sebagian pekerjanya. Hal ini pun berdampak pada upah yang diterima. Oleh karena itu, THR dihitung berdasarkan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikalikan rata-rata upah

satu bulan.

Di samping itu, mulai pekan depan Dinsosnakertrans Kota Yogya juga akan mendirikan posko pemantauan THR di kompleks Balaikota. Petugas hubungan industrial pun akan tersebar untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan formulir ke pengusaha. Formulir itu berkaitan kesanggupan membayar THR, waktu pemberian serta jumlah orang yang akan menerimanya.

"Tahun-tahun sebelumnya sebenarnya tidak banyak persoalan. Justru persoalan itu terjadi di komunikasi yang kurang baik. Misal THR akan diberikan H-3 namun itu tidak tersampaikan ke pekerja. Semoga tahun ini tidak lagi terjadi setelah ada kesepakatan," urainya. **(Dhi)-f**

Peninggalan Arkeolog Tunjukkan Jejak Peradaban Asing



KR-Juvintarto

Diskusi luring dan daring membahas 2 penelitian arkeologi dari Balai Arkeologi DIY.

YOGYA (KR) - Jejak peradaban asing di Jawa terlihat dari peninggalan monumental (yang tidak bisa dipindahkan) dan non monumental (yang bisa dipindahkan berupa naskah kuno dan lainnya). Diskusi temu ilmiah rutin membahas 2 penelitian arkeologi, Kamis (15/4) pagi di Ruang Seminar "RP Soejono" Balai Arkeologi DIY, Jalan Gedongkuning Yogya, membahas 2 penelitian Bidang Arkeologi Islam-Kolonial.

Penelitian pertama dari Drs Masyhudi menyampaikan hasil penemuan peninggalan arkeologi non monumental berupa naskah kuno tahun 1347 M yang menunjukkan manuskrip tradisi besar keilmuan agama Islam dalam bentuk karya tulis. "Ditulis dengan naskah pegon (kuno) berbahasa Jawa, juga ada pengaruh huruf/bahasa Arab," ungkap Masyhudi.

Diskusi dipandu Moderator Baskoro dan juga diikuti Kepala Balai Arkeologi DIY Drs Sugeng Riyanto MHum yang memberikan masukan-masukan agar penelitian arkeologi lebih lengkap. Diskusi secara luring dan daring dengan zoom meeting.

Peneliti kedua Mrs M Chawari MHum menyampaikan hasil penelitian peninggalan arkeologi monumental di masa kolonial berupa Rekonstruksi Jembatan Angkat Benteng Van Den Bosch yang ada di Pelem, Ngawi Jawa Timur. "Peninggalan ini melahirkan pula jejak-jejak arsitektur masa kolonial, hampir sama seperti benteng Vastenburg di Surakarta," terang M Chawari.

Kedua penelitian tidak berhubungan atau tidak bisa ditarik benang merah karena berbeda tempat dengan jarak waktu 500-an tahun. Tetapi kedua penelitian ini menunjukkan adanya jejak peradaban asing. "Tahun 1347 masih di masa Kerajaan Majapahit, namun di waktu itu sudah mulai ditemukan masyarakat/komunitas Muslim hidup berdampingan," terang Masyhudi. **(Vin)-f**

MUDIK SEBELUM LARANGAN DIBERLAKUKAN

Penumpang di Terminal Giwangan Diprediksi Naik

YOGYA (KR) - Penumpang yang memanfaatkan Terminal Giwangan, baik berangkat maupun datang untuk kepentingan mudik, diprediksi naik hanya 1,5 persen. Terutama untuk arus kedatangan dan keberangkatan sebelum larangan mudik diberlakukan pada 6-17 Mei 2021.

Menurut Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Yogyakarta Bakti Zunanta, kenaikan penumpang memang tidak terlalu signifikan karena rentang larangan mudik ini cukup lama yakni hampir dua pekan.

"Tentunya para pemudik akan berhitung dengan biaya yang harus dikeluarkan," katanya,

Kamis (15/4).

Bakti menjelaskan, kategori pemudik yang nantinya akan memanfaatkan waktu sebelum larangan mudik diberlakukan adalah kelompok keluarga yang hanya mengantarkan istri dan anaknya kembali ke kampung halaman. Selebihnya, suami atau pengantar akan segera kembali ke kota untuk bekerja. Hal ini karena masa libur lebaran dipangkas sehingga tidak terlalu panjang.

Saat ini, rata-rata terdapat sekitar 400 bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang masuk ke Terminal Giwangan. Jumlah penumpang yang datang maupun berangkat sekitar 3.000 hingga 4.000 orang per hari. Sedangkan

bus antar kota dalam provinsi (AKDP) yang masuk ke Terminal Giwangan tercatat lebih sedikit yaitu 80 hingga 90 armada tiap hari.

"Jumlah tersebut sudah cukup bagus jika dibanding awal pandemi, termasuk saat lebaran. Setahun lalu, hanya ada sekitar 30 hingga 40 bus AKAP yang masuk ke Giwangan setiap harinya," imbuh Bakti.

Mengenai rencana larangan atau pembatasan operasional moda transportasi saat larangan mudik termasuk bus yang melayani rute jarak jauh, Bakti mengatakan masih menunggu keputusan dari pemerintah. Selain menerapkan pembatasan operasional untuk berbagai mo-

da transportasi, upaya lain yang juga akan ditempuh pemerintah adalah penyekatan di sejumlah titik yang berada di perbatasan, termasuk di DIY yang akan dilakukan di 10 titik.

Jalur masuk utama ke DIY yang akan dilakukan penyekatan berada di sisi timur yaitu di jalur Prambanan-Yogya, di sisi barat berada di Temon, dan di sisi utara dilakukan di Tempel. Sedangkan sisanya dilakukan penyekatan di jalur alternatif yang mungkin dilintasi pemudik. Sementara di Kota Yogya selama ini tidak pembatasan langsung dengan provinsi tetangga sehingga diharapkan tidak ada penyekatan. **(Dhi)-f**

KEBOCORAN SOAL DALAM ASPD TAK BOLEH TERULANG

Guru Harus Kedepankan Kejujuran

RAPAT FORMATUR DEKOPINDA KOTA YOGYA

Berhasil Menyusun Pimpinan Periode 2020-2025

YOGYA (KR) - Rapat Formatur Penyusunan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Yogyakarta telah berhasil menyusun pimpinan Dekopinda Kota Yogyakarta masa bakti 2020-2025 yang terpilih berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah (Musda) Dekopinda Kota Yogyakarta tahun 2020.

Rapat formatur digelar di Griya UMKM, Jalan Tamansiswa 39 Yogyakarta, 1 April 2021. Diputuskan sebagai Ketua Dekopinda Kota Yogyakarta masa bakti 2020-2025 yaitu Iskandar SE.

Untuk Bidang Pengembangan Kelembagaan, Keanggotaan, PSDM dan Pengkajian Serta Inovasi, sebagai Wakil Ketua yaitu Ki Bambang Widodo MPd. Sedangkan Ketua

Komite Kelembagaan, PSDM, Keanggotaan, Pengkajian dan Inovasi yaitu Tukirjono.

Untuk Bidang Advokasi dan Hukum, Komunikasi dan Teknologi, Informasi, Pengembangan Pemuda serta Perempuan, sebagai Wakil Ketua yaitu Harri Dwi Soewarsono SH. Sedangkan Ketua Komite Advokasi dan Hukum, Komunikasi dan Teknologi, Informasi, Pengembangan Pemuda serta Perempuan, yaitu Sri Sudartina.

Kemudian untuk Bidang Pengembangan Permodalan, Jaringan Usaha-usaha Koperasi, Koperasi Syariah dan Jasa Keuangan, sebagai Wakil Ketua yaitu Hari Cahyadi SE. Sedangkan Ketua Komite Fasilitas Permodalan, Jaringan Usaha Koperasi, dan Usaha Sektoral yaitu Iwa Khairuttagwa SThI. **(Dev)-f**

YOGYA (KR) - Kebocoran soal Matematika dalam pelaksanaan Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) di SMP Negeri 4 Depok, menjadi pelajaran berharga yang tidak boleh terulang. Karena kebocoran soal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan yang ada dalam ASPD, tapi secara tidak langsung juga merugikan peserta didik. Pasalnya dengan adanya kasus kebocoran tersebut mereka harus mengikuti ujian ulang.

"Adanya kasus kebocoran soal Matematika dalam ASPD menimbulkan keprihatinan dari sejumlah kalangan. Untuk supaya kasus serupa tidak terulang kami selalu menekankan kepada guru agar senantiasa mengedepankan kejujuran dan profesionalitas. Termasuk saat pelaksanaan ASPD, karena nilai tinggi yang diperoleh dengan cara curang tidak akan banyak berarti," kata Wakil Ketua PGRI DIY Sudarto SPd MT di Yogyakarta, Kamis (15/4).

Sudarto mengungkapkan, kesuksesan pelaksanaan ASPD tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Disdikpora DIY maupun dinas pendidikan kabupaten/kota. Semua itu akan bisa diwujudkan apabila siswa, guru maupun kepala sekolah senantiasa mengedepankan profesionalitas dan kejujuran.

Mengingat salah satu tujuan dari ASPD untuk pemetaan kualitas sekolah dan menjadi salah satu komponen dalam seleksi PPDB jenjang SMA/SMK.

"Kesuksesan atau keberhasilan anak tidak hanya ditentukan dari nilai akademik, tapi juga karakter. Untuk itu kami mengimbau agar guru

senantiasa mengajarkan kepada anak tentang arti pentingnya kejujuran. Bukan sebaliknya hanya karena keinginan untuk mendapatkan nilai tinggi sampai melakukan kecurangan. Oleh karena itu sebagai pengurus PGRI DIY saya berharap kecurangan dalam ASPD tidak terulang lagi," terangnya. **(Ria)-f**

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Akademisi FE UCY Siap Bantu Pemerintah

YOGYA (KR) - Satu tahun pandemi telah menghantam seluruh sektor, termasuk ekonomi. Banyak usaha yang lumpuh, namun beberapa sektor masih tetap eksis dan bahkan mampu tumbuh dan berkembang. Antara lain usaha food and beverage, usaha kebutuhan bahan pokok (sembako), usaha jasa/produk kesehatan, usaha jasa pendidikan dan pelatihan, serta usaha bisnis digital.

Demikian dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (FE UCY) Hanan Wihasto SE MM dalam webinar dan workshop bertema 'Satu Tahun Pandemi (Apa Kabar Bisnis Indonesia ?)', Sabtu (10/4). Webinar diselenggarakan oleh FE UCY menghadirkan narasumber Dosen Manajemen UCY Miftafitri Yana SE MM, Kepala Biro Admisi Kemahasiswaan, Admisi Humas Kerasama (BAKAHK) Nur Habibbah Rachmi SAK MAK dan Pengusaha/Pelaku Bisnis Yossie PD Wardhana. Sebagai keynote speaker Rektor UCY Ciptasari Prabawanti SPsi MSc PhD.

Menurut Hanan, saat ini Pemerintah dituntut untuk bekerja ekstra keras, tidak hanya dalam bentuk perumusan dan pelaksanaan kebijakannya, tetapi juga harus dapat mengkomunikasikan kepada

publik agar tidak terjadi kegaduhan yang kontra produktif. UCY melalui FE diharapkan mampu memberikan dukungan dalam penyusunan kebijakan yang didasarkan atas penelitian akademik sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang bumi dan bisa diimplementasikan.

"Melalui webinar ini diharapkan mampu memformulasikan mana-mana bisnis yang 'off' dan mana-mana bisnis yang 'on' yang memung-

kinkan untuk bisa didorong mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Nur Habibbah Rachmi mengatakan, tingginya angka penularan Covid-19 memaksa Pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya sejumlah bidang bisnis seperti pariwisata, penerbangan dan otomotif. Namun ada bidang yang justru menguat seperti telekomunikasi, ritel dan e-commerce. **(Dev)-f**

AYO... BELANJA Luar Biasa MURAH Bisa Dapat MOBIL
12 April s.d. 31 Juli 2021

RAHPELUANG 4X LEBIH BESAR DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI

1 MOBIL DAINATSU AYLA **2 MOTOR HONDA BEAT** **10 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A22** **5 SEPEDA POLYGON**

mirota_nayan@yahoo.com | mirotakampus.com | mirota.kmps | mirota_kampus | @mirota_kampus

Adanya Vaksinasi, STIPRAM Siapkan Program Luar Negeri Mahasiswa yang Tertunda

Suasana perkuliahan di kampus STIPRAM sangat dirindukan mahasiswa, semoga dengan vaksinasi Covid-19 segera beralu.

Dengan vaksinasi Covid-19, kegiatan student exchange mahasiswa STIPRAM diharapkan bisa segera aktif kembali.

WABAH Covid-19 masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat, menyikapi kondisi tersebut penegakkan protokol kesehatan harus selalu ditegakkan. Karena tatanan kehidupan masyarakat sudah berubah dimana semua pihak harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pandemi Covid-19 yang terjadi semua negara menjadikan masyarakat memiliki budaya baru. Budaya baru itu seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan dan selalu mengenakan masker saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.

"Dampak Covid-19 memang sangat luar biasa, tidak hanya menyentuh kesehatan, budaya, perekonomian, dan bahkan dunia pendidikan. Para pengelola pendidikan sungguh sangat prihatin dengan keadaan saat ini karena sistem pendidikan berubah menjadi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)," kata Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM) Dr Suhendroyono didampingi Wakil Ketua STIPRAM, Dr Damiasih di Yogyakarta, Kamis (15/4).

Damiasih menyatakan, tidak hanya sebatas berbagai permasalahan di atas yang muncul, namun tidak serta merta pendidikan di negara ini bisa digantikan dengan PJJ. Sebagai bukti pada pendidikan tinggi yang bergerak dibidang vokasi khususnya, sistem PJJ semakin mempersempit pencapaian kualitas pembelajaran. Disatu sisi anak didik harus dibekali ilmu yang cukup, namun disisi lain ilmu vokasi tidak dapat didariskan. Untuk itu pendidikan tinggi harus membuat terobosan, inovasi dan strategi yang tepat sehingga kualitas pendidikan tetap dapat diper-tahankan.

"Segala strategi pembelajaran ditempuh, mulai dari sistem konvensional dengan memberikan tugas-tugas dari buku-buku materi yang ada sampai dengan pembelajaran berbasis teknologi telah diupayakan," ungkap Damiasih. Menurut Damiasih, saat ini dunia patut bersyukur bahwa vaksin telah ditemukan dan tenaga pendidik serta masyarakat juga mulai diberikan vaksin. Adanya vaksinasi tersebut menjadi kabar gembira termasuk bagi dunia pendidikan. Karena dengan adanya vaksinasi tersebut diharapkan pembelajaran tatap muka dapat segera diawali lagi. Mengingat pendidikan tidak dirancang sepenuhnya dengan PJJ, maka vaksinasi menjadi andalan masyarakat dan kualitas pendidikan kembali akan ditingkatkan. "Dengan vaksinasi sektor pariwisata akan tampak mulai menggeliat, karena masyarakat butuh hiburan setelah selama lebih dari setahun terkungkung dengan wabah covid-19 ini. Bila diperhatikan, saat ini masyarakat sudah mulai banyak yang memanfaatkan liburan, hal ini karena pemerintah telah memberikan izin terbatas pada sektor-sektor pariwisata untuk mulai dibuka. Dengan demikian perekonomian masyarakatpun akan kembali bergairah," terangnya. (Ria)